

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE DI KELURAHAN KOTA KARANG, BANDAR LAMPUNG

Oleh

SYENDI ARJUNA

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menggolongkan mangrove di Kota Karang, Bandar Lampung sebagai ekosistem mangrove yang dalam pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan dibolehkan, kegiatan dibolehkan dengan izin, dan kegiatan yang tidak dibolehkan. Berdasarkan analisis, mangrove di Kota Karang masih mengalami penebangan liar, banyaknya sampah domestik yang menyangkut pada mangrove, dan permasalahan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan mangrove, faktor yang mempengaruhi implementasi, dan hasil dari implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi ekosistem mangrove di Kota Karang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan indikator untuk melihat implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dengan variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selanjutnya, peneliti juga melakukan evaluasi implementasi menurut Edward III dan standar kegiatan menurut Nurhayati dan Murdiyarso. Hasil analisis, menemukan bahwa komunikasi yang buruk, sumber daya yang tidak cukup, disposisi atau sikap pelaksana yang tidak efektif, serta inefisiensi struktur birokrasi. Pada bagian evaluasi implementasi, diketahui hanya ada satu standar kegiatan yang berhasil dilaksanakan, yaitu pada penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove di Kota Karang terjadi ketidakefektifan dan implementasi pengelolaan mangrove di Kota Karang belum memenuhi standar kegiatan konservasi mangrove.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, pengelolaan, mangrove.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MANGROVE ECOSYSTEM MANAGEMENT POLICY IN KOTA KARANG VILLAGE, BANDAR LAMPUNG

BY

SYENDI ARJUNA

Regional Regulation of Lampung Province No. 14 of 2023 concerning the Regional Spatial Plan classifies the mangrove area in Kota Karang, Bandar Lampung as a mangrove ecosystem, in which activities are categorized into three types: permitted activities, activities permitted with authorization, and prohibited activities. Based on analysis, mangroves in Kota Karang are still experiencing illegal logging, a high volume of domestic waste entangled in the mangroves, and other related issues. This study aims to describe the implementation of mangrove management, the factors influencing its implementation, and the outcomes of the policy implementation for managing the mangrove ecosystem conservation area in Kota Karang. The data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The researcher used indicators proposed by Edward III to assess policy implementation, focusing on variables such as communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure. Furthermore, the researcher evaluated the implementation using Edward III's framework and activity standards based on Nurhayati and Murdiyarso's criteria. The analysis found issues such as poor communication, insufficient resources, ineffective disposition of implementers, and inefficiency in the bureaucratic structure. In the implementation evaluation, it was found that only one activity standard was successfully carried out, namely law enforcement. Thus, this study concludes that the policy implementation for managing the mangrove ecosystem area in Kota Karang is ineffective, and the mangrove management implementation in Kota Karang has not yet met the established conservation activity standards.

Keywords: policy implementation, management, mangrove.